

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 NOMOR : 050 /  
 /2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
 TAHUN 2025

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Data pribadi penyedia jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi Penyedia jasa - Melanggar HAM	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
2	Rekomendasi teknis IMB	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi/perusahaan - Melanggar HAM	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
3	Rekomendasi teknis GSS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi/perusahaan - Melanggar HAM	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
4	Data personal pelanggan IMB dan GSS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi - Melanggar HAM	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
5	Data LHK ASN Dinas PU	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi Penyedia jasa - Melanggar HAM	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
6	Biodata Elektronik PNS (database)	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H. - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 Huruf h.	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
7	Dokumen/Berkas /Arsip PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	

8	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman sipil.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP P 17 huruf h.				
9	Rincian hasil tes potensi/ kompetensi PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
10	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
11	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.				
12	Data PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan	- Mengungkap data pribadi PNS - Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
13	Daftar Nilai SKP dan DP-3 PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.				
		- PP No. 10 Tahun 1978 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Ps 6				
14	Data Rekam Medis PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. - Melindungi keamanan dan kenyamanan PNS.	
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.				
		- Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam Medis Ps 10.				

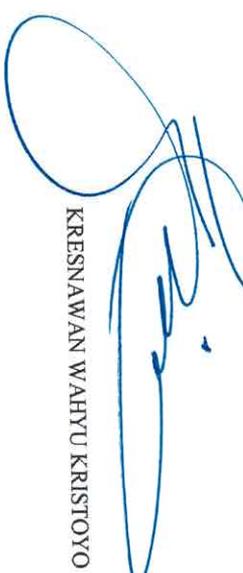
15	Data Usulan Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Terbatas sampai dengan pelantikan.	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.	
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.				
16	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia, meliputi : - dokumen keuangan (SPJ berikut lampirannya, Dokumen anggaran dan otorisasinya, surat Pencairan anggaran - Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perorangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan	Selama masih berlaku	merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	
17	Dokumen penawaran kontrak.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - Perpres No. 54 th. 2010 ttg Pengadaan Barang /jasa Pemerintah	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga obyektivitas penilaian.	
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i.				
		- PP No. 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.				
					Membantu Badan	

18	Laporan hasil pemeriksaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah.</li> <li>- Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.</li> <li>- Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I Bab Norma Pelaporan Huruf a.)</li> <li>- UU No. 14 th 2008 tentang KIP Ps 17 huruf I.</li> <li>- PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>- Pp No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> <li>- Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah.</li> </ul>	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	
19	Bukti Tindak Lanjut LHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>- Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (lampiran I Bab norma pelaporan a.)</li> </ul>	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Membantu Badan Publik dalam memperbaiki kualitas manajemen instansi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik	

		- Permenpan No 9. th 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.				
20	Lokasi Server	- UU No11. th 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30-37).	Tidak terbatas	Tindak kriminal pengrusakan, pencurian data.	Melindungi atau mengamankan perangkat serta data.	
21	Internet Protocol/Ip Address private.	- UU No11. th 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30) - UU No11 th 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30)	Tidak terbatas	Penerobosan /penyalahgunaan hak akses	Melindungi atau mengamankan perangkat serta data	
22	Bandwidth manajemen	-	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	
23	Kode akses elektronik	- UU No11. th 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 1 angka 16 )	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan Komputer.	
24	Sistem keamanan Elektronik	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps. 17 huruf j).	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan Komputer	
25	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps. 17 huruf h).	Sampai ada persejuaan tertulis dan wajib pajak	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga rahasia (data kekayaan) pribadi	

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal, 03 Maret 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANTUMAS

  
KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO